

PERAN INTERNATIONAL NON-GOVERNMENT FORUM ON INDONESIAN DEVELOPMENT (INFID) DALAM MENANGKAL RADIKALISME DI INDONESIA

Oleh : Veronika Lestary Silaen

Pembimbing: Indra Pahlawan, S.IP. M.Si

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Human rights, democracy and the state are conceptions that need to go hand in hand and support each other. Unresolved gross human rights cases raise many questions about how the Indonesian government is actually trying to reduce the number of violence and deprivation of freedom, especially of religion. The problems experienced by the state are complex and require collaboration from all parties, one of which is international organizations. In an effort to minimize cases of human rights violations and democracy in Indonesia, INFID as an international organization has made various efforts.

This research uses qualitative research methodology by conducting centralized interview techniques as primary data and library research as secondary data. This research is descriptive-explanatory which is general to specific. This research uses the international organization theory of David Lewis and Nazneen Kanji with indicators are: 1). Implementer; 2). Catalyst; 3). Partner.

The efforts made by INFID include creating a Human Rights and Democracy Program with many derivative programs such as the Human Rights Festival, the Preventing Violent-Extremism (PVE) Program, and building international cooperation in Human Rights City / District activities to help the pace of good practices in domestic implementation.

Keywords: Democracy, Human Rights, INFID, Role of International Organizations

PENDAHULUAN

Negara, HAM dan Demokrasi merupakan tiga konsepsi yang perlu untuk selalu berjalan beriringan. Ketiga konsepsi ini saling mendukung keberadaan satu sama lain. Membahas mengenai nilai-nilai kemanusiaan selalu memiliki daya tarik sendiri. Hak Asasi Manusia pada dasarnya bersifat universal¹. Diskursus yang terjadi kerap meninggalkan perubahan orientasi pemaknaan, yang berimbas pada implementasinya².

Menurut UU Hak Asasi Manusia No 39 tahun 1999 pasal 1 tentang Hak Asasi Manusia,

“ *Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*³.

Permasalahan yang dialami oleh negara sudah menjadi permasalahan yang kompleks dan membutuhkan kolaborasi dari segala pihak. Dalam membantu laju pembangunan dan tujuan (*Sustainable Development Goals*) atau SDGs 2030⁴ sebagaimana dipaparkan dari 17 SDGs pentingnya membangun kemitraan dan

kolaborasi antar pihak untuk mencapai efektivitas tujuan.

Kajian tulisan ini akan menjelaskan bagaimana peran INGOs dalam membantu laju pembangunan sebuah negara dengan studi kasus INFID sebagai INGOs dalam menangkal radikalisme di Indonesia.

Organisasi internasional INFID berperan dalam mengawal pembangunan di daerah-daerah di Indonesia dengan memberikan masukan-masukan strategis, serta berbagi pengalaman dengan sesama komite dari berbagai negara. INFID mewakili OGP dalam berbagai forum tingkat tinggi untuk berbagi pengalaman praktik baik dalam membangun agenda pemerintahan terbuka Advokasi kebijakan yang berbasis bukti menjadi langkah yang selalu dilakukan. INFID Memiliki 3 fokus program utama yaitu, Penurunan Ketimpangan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Program HAM dan Demokrasi⁵.

Menurut data dari Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT), selama lima tahun terakhir tren ancaman terorisme di Indonesia bergerak secara fluktuatif meningkat pada tahun 2019, lalu menurun pada 2020 dan meningkat lagi pada tahun 2022⁶, berdasarkan laporan GTI (*Global Terrorism*

¹ George Clooney, ‘Hak Asasi Manusia (HAM)’, 2019 <<https://doi.org/10.31227/osf.io/9trnz>>.

² Hak Asasi and Manusia Ham, ‘Manusia (HAM)’, 2005 (2005).

³ UU Hak Asasi Manusia No 39 tahun 1999 pasal 1 tentang Hak Asasi Manusia

⁴ UNDP, ‘Background of the SDGs’, *UNDP.Org*, 2020.

⁵ Bagus Takwin and others, ‘Studi Tentang Toleransi Dan Radikalisme Di Indonesia’, 2016, 1–260

<<https://www.infid.org/storage/app/uploads/public/5eb/870/94f/5eb87094f3b0c084987496.pdf>>.

⁶ Alfrida Heanthy Panjaitan, Neneng Sri Rahayu, and Hamka, ‘Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme’, *Journal Publicuho*, 6.4 (2023), 1521–36 <<https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.297>>.

Index) tahun 2023 tercatat memiliki skor 5,5 poin⁷, Indonesia menempati peringkat ke-24 dari daftar negara paling terdampak terorisme dan memberikan data-data yang bisa memperkuat penelitian ini dengan menganalisa bagaimana peran INFID sebagai organisasi internasional.

KERANGKA TEORI

TEORI PLURALISME

Komunitas keamanan yang dibayangkan oleh para pengusung liberalisme sosiologis ini dapat terbentuk jika memenuhi syarat, meningkatnya komunikasi sosial, mobilitas orang yang semakin tinggi, hubungan ekonomi yang kuat, jaringan transaksi timbal-balik antar anggota komunitas yang semakin luas⁸. Aktor Negara melalui pemerintahannya yang memiliki peran dalam membuat kebijakan atau pengambilan langkah strategis.

Aktor non-negara yang teknologi dan informasi, aktor non-negara dapat melakukan sesuatu hal signifikan untuk membantu menyelesaikan isu-isu dalam Negara tersebut⁹. Hal ini relevan dengan INFID sebagai aktor non-Negara yang merespon berbagai isu terkait

ketimpangan sosial, SDGs serta Demokrasi dan HAM. INFID dalam perspektif ini melakukan tugasnya sebagai aktor non-Negara yang membantu mengadvokasi dan perantara yang dalam hal ini terkait masalah ketimpangan, SDGs, HAM dan Demokrasi di Indonesia agar dapat diselesaikan.

LEVEL ANALISA

Hubungan internasional sebetulnya adalah hubungan antar berbagai kelompok kecil di berbagai negara. Artinya, peristiwa internasional sebenarnya ditentukan bukan oleh individu, tetapi oleh kelompok kecil (seperti kabinet, dewan penasehat, keamanan, polit biro, dan sebagainya) dan oleh organisasi, birokrasi, departemen, badan-badan pemerintahan, dan sebagainya. Dengan demikian, untuk memahami hubungan internasional kita harus mempelajari perilaku kelompok-kelompok kecil dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam hubungan internasional. Tingkat analisa atau level analisis adalah cara lain mengelompokkan teori dalam studi Hubungan Internasional. Level analisis adalah kelompok.

METODE PENELITIAN

Dalam merancang penelitian ini, dilakukan studi dokumen terhadap berbagai sumber literatur dan dokumen yang terkait dengan sejarah, misi, dan mengenai pengalaman, tantangan, dan dampak kerja INGO forum dalam mendukung

⁷ GTI, 'Quantifying Peace and Its Benefits Global Terrorism Index 2023', *Institute for Economics and Peace*, 2023, 1–95
<<http://visionofhumanity.org/resources>>.

⁸ Asripa Asripa, Devy Habibi Muhammad, and Ari Susandi, 'Pluralisme Dalam Perspektif Pemikiran Gus Dur Dan Nurcholish Majid', *FALASIFA : Jurnal Studi Keislaman*, 12.02 (2021), 75–90
<<https://doi.org/10.36835/falasifa.v12i02.555>>.

⁹ Laode Muh. Fathun, 'Resensi Human Rights in International Relations', *MANDALA Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 1.1 (2017), 166–73.

implementasi program HAM dan Demokrasi.

Kegiatan INGO forum di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk memahami latar belakang dan konteks kerja organisasi tersebut sejak awal terlibat dalam isu-isu HAM dan Demokrasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi Internasional INFID Berdiri sejak tahun 1985 dengan perjuangan untuk pembangunan Indonesia menjadi tujuan utama organisasi masyarakat sipil ini¹⁰. Peran *International Non-Government Forum on Indonesian Development* (INFID) berdasarkan teori *Non-Governmental Organizations* yang dikemukakan oleh David Lewis dan Nazneen Kanji dimana terdapat tiga peran dari *Non-Governmental Organizations*, yaitu: sebagai implementer, sebagai katalisator, dan partner¹¹.

Peran INFID Sebagai Implementer

INGO atau *International Non Government Organization* sebagai implementers atau pelaksana merupakan hal-hal yang berperan dalam memobilisasi berbagai sumber daya dalam penyediaan barang dan jasa bagi orang-orang yang membutuhkan. Hal-hal tersebut dilakukan untuk menunjang suatu isu-isu seperti isu di bidang kesehatan, keuangan, pertanian, lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan lain-lain. Dalam melaksanakan program, INGO dapat beraksi sesuai dengan program masing-masing, atau sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan antara pihak INGO dengan pihak yang bekerjasama baik pemerintah atau

pendonor. Kegiatan yang dapat dilakukan seperti mengadakan pelatihan atau penelitian kepada pemerintah, swasta, ataupun masyarakat.

Menjalankan Program Pencegahan Ekstremisme Berkekerasan (PVE-Preventing Violent Extremism)

Penyebaran radikalisme terjadi diruang publik dunia maya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat 600 situs atau akun di media sosial yang bermuatan unsur radikal selama 2019. Dari beberapa platform media sosial, Facebook menjadi yang paling banyak. Untuk Facebook ada 167 akun, WhatsApp 156 kontak atau grup, Telegram 119 channel atau grup, Twitter 85 akun atau grup, Instagram 50 akun, YouTube 24 akun atau grup, situs web 14 link dan yang lain satu akun grup¹². Peningkatan ini memberikan pandangan baru untuk bisa memperluas dampak dan manfaat.

Peran INFID Sebagai Catalysts (KATALISATOR)

Peran katalis yaitu sebagai agen perubahan yang dapat menginspirasi, memfasilitasi, dan berkontribusi dalam mempromosikan norma dan nilai baru serta membuat suatu perubahan dalam suatu masalah yang ada. Peran katalis adalah salah satu kemampuan dari INGO, hal ini dapat ditujukan kepada individu atau kelompok masyarakat lokal, atau di antara aktor-aktor lain seperti pemerintah, swasta atau donor.

Penguatan dan Pemberdayaan Peran dan Ruang untuk Multipihak

Penguatan dan pemberdayaan peran dan ruang untuk multipihak (pemerintah, organisasi masyarakat sipil, kelompok minoritas). INFID menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru agama

¹⁰ infid, 'Profil INFID', *Infid.Org*, 2023.

¹¹ Peter Söderbaum, *Non-Governmental Organisations and Development, International Journal of Water Resources Development*, 2010, XXVI
<<https://doi.org/10.1080/07900627.2010.519527>>.

¹² Audit Negara, 'Laporan 2019', *Laporan Ketua Audit Negara 2019*, 2019, 155
<https://drive.google.com/file/d/1w62u9wC2j_pxsTWaE7AO1AUKLjh6-M4D/view>.

Islam dan meningkatkan moderasi beragama pada pelajaran agama Islam. Bekerja sama dengan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), INFID telah melatih 30 (tigapuluh) guru pendidikan agama Islam SMA/SMK di Provinsi Banten, 120 (seratus dua puluh) guru pendidikan agama Islam (GPAI) memperoleh pengetahuan dalam kegiatan webinar kelas inspiratif, 40 (empat puluh) guru PAI pilihan telah mengikuti kegiatan lanjutan untuk melakukan aksi di sekolahnya.

Intervensi pada guru semakin bertambah relevan pada era keterbukaan dan media sosial semakin berperan dalam menyebarkan informasi. Peningkatan literasi dapat mendorong guru PAI menjadi role model yang baik dalam mengunyah informasi secara kritis dan sekaligus mempromosikan toleransi dan moderasi beragama bagi siswa. Sekaligus menjawab kekhawatiran yang muncul dari BNPT yang menyebutkan guru PAI berpotensi sebagai pihak yang menyebarkan paham radikal.

Kegiatan Festival Kota HAM

Pada tahun 2019, kegiatan Festival Kota HAM kembali dilaksanakan dengan format konferensi HAM. Acara ini merupakan kegiatan rutinitas tahunan yang merupakan kolaborasi antara Komnas HAM, INFID, dan KSP. Konferensi HAM 2019 di Jakarta dengan tema “Memperkokoh Keberagaman dan Inklusi Mewujudkan Indonesia yang Tangguh dan Harmonis”. Tema inklusi yang diangkat diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran publik pada hak-hak para penyandang disabilitas.

Harapannya adalah terwujudnya kesetaraan sekaligus keadilan bagi penyandang disabilitas serta kelompok marginal yang lain.

Melibatkan Kontribusi Masyarakat Lokal Dalam Menangkal Radikalisme

Melalui Festival Hak Asasi Manusia

INFID membuat rencana dengan memperluas program menangkal radikalisme dengan Kegiatan Festival Hak Asasi Manusia yang diadakan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada 19-21 November 2019. Acara ini menarik lebih dari 3.300 peserta. Festival ini menampilkan berbagai dimensi penegakan hak asasi manusia dan demokrasi.

Berbagai elemen masyarakat terlibat, berinteraksi dengan para pemimpin lokal yang berpartisipasi. Elemen-elemen ini mengungkapkan bagaimana keberagaman harus dihargai, dan bagaimana kerjasama antara masyarakat dan pemerintah harus dipupuk di tingkat lokal.

Generasi muda berpartisipasi melalui program Fellowship 3.0:

- 1) Menulis salah satu dari dua tema yang berkaitan dengan Kabupaten/Kota Ramah HAM;
- 2) Menjadikan Indonesia Negara yang Manusiawi
- 3) Memajukan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan Modal Sosial dan Budaya.

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) melaporkan dan menulis di Festival Hak Asasi Manusia. Terkait pencegahan kekerasan, radikalisme, dan ekstremisme, INFID memandang ekstremisme kekerasan (berbasis agama) sebagai persoalan serius karena menyangkut sikap hormat dan menghargai keberagaman sebagai landasan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Keberagaman dirusak maka tujuan bersama mendirikan negara akan kehilangan kekuatannya, dan pada akhirnya berdampak pada eksistensi bangsa dan negara Indonesia.

Advokasi Melalui Riset

Pada tahun 2019, INFID memulai 15 kegiatan di bawah naungan Pencegahan Kekerasan Riset.

Empat penelitian telah dilakukan:

- 1) Penelitian mengenai “Dampak Dinamika Regional terhadap Komunitas Muslim di Indonesia”;
- 2) Penelitian tentang “Peran Organisasi Islam Moderat dalam Mencegah Ekstremisme Kekerasan: Studi Kasus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah”;
- 3) Penelitian “Derajat Radikalisme di Masjid Kampus 10 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia”;
- 4) Makalah Kebijakan “Strategi Pendidikan dalam Mencegah Intoleransi, Radikalisme, dan Ekstremisme Kekerasan di Perguruan Tinggi, Masjid Kampus dan Media Sosial”¹³.

International Non-Government Forum On Indonesian Development (INFID) melaksanakan kegiatan yang merupakan bagian dari Program Respons terhadap Situasi Sosial dan Politik¹⁴. Kegiatannya sebagian dilaksanakan di Indonesia, dan sisanya di negara lain. Kegiatan tertentu merupakan bagian dari tiga program inti INFID, sementara kegiatan lainnya berada di luar program (SDGs, Mengurangi Ketimpangan, dan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi).

Penguatan dan pemberdayaan peran orang muda. Untuk kepentingan ini, bekerjasama dengan Jaringan Gusdurian, INFID yang telah memproduksi modul dan menyelenggarakan *Youth Camp*: “MudaToleran” diselenggarakan di Kampoeng Media Digital Yogyakarta bertujuan menguatkan kapasitas pemimpin muda di Indonesia. Dari 597 orang muda yang mendaftar hanya 30

peserta terpilih dengan komposisi perempuan 15 orang, laki-laki 15 orang. Tiga puluh peserta tersebut berasal dari berbagai latar belakang, yaitu 17 peserta berasal dari Jawa dan 13 berasal dari luar Pulau Jawa (Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, NTT, NTB, Riau, Maluku, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara)¹⁵.

Youth Camp “Muda Toleran” dilaksanakan dengan metode *interfaith dialogue* untuk mendobrak “sangkar budaya” (*cultural aviaries*) dengan menyediakan ruang bertemunya beragam budaya (*interculturalism*). *Youth camp* didesain dengan pendekatan orang muda dan keberagaman yang dilakukan dengan berbagai metode seperti “*river of live*”, kunjungan ke lapangan (pesantren waria, penghayat kepercayaan Sapta Darma, dan pura), *Unity in Diversity: Scenario Thinking*, *Social Presencing Theatre*, Mengenal *U-Theory*: Menganalisis Poladan Tren, Struktur Penyebab, dan Mental Model, serta *Social presencing theater*.

INFID Sebagai Partners (MITRA)

Peran mitra yaitu INGO melakukan upaya kerja sama dengan pihak atau aktor lain sekaligus menanggung risiko bersama dengan mitranya. Peran mitra termasuk tren yang berkembang di kalangan INGO untuk bekerja dengan pemerintah, donor, dan sektor swasta pada kegiatan bersama, seperti dalam hal memberikan masukan dalam program multi yang lebih luas atau sebuah proyek program. INFID Sebagai mitra, INGO bekerja bersama pemerintah, organisasi lokal, dan aktor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan.

INFID dalam WHRCF

International Non Government Forum On Indonesian Development (INFID) berpartisipasi aktif dalam *World Human Rights Cities Forum* (WHRCF)

¹³ M Cardona, *Buku Studi Indikator Kota HAM, Solid State Communications*, 1998, CVII.

¹⁴ Ekawahyu Kasih, ‘Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’, *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 34.4 (2018), 1–87
<[http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal Edisi 34 Juni 2018.pdf](http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal%20Edisi%2034%20Juni%202018.pdf)>.

¹⁵ *ibid*.

2019 di Gwangju, Korea Selatan. Saat forum tersebut, INFID bersama Komnas HAM dan *Raoul Wallenberg Institute* mengadakan sesi mengenai kota hak asasi manusia dan kaitannya dengan SDGs.

WHRCF mempertemukan para pemimpin dari berbagai daerah yang belajar tentang bagaimana hak asasi manusia dan demokrasi harus dilaksanakan secara bersama dengan Komnas HAM. Dihadiri oleh 45 orang perwakilan pemerintah daerah dan aktivis dari 12 Kabupaten/Kota di Indonesia¹⁶. Kehadiran kegiatan WHRCF menjadi wadah untuk mempertemukan pemimpin dari berbagai daerah dalam pembahasan HAM dan Demokrasi yang selaras dengan SDGs atau *Sustainable Development Goals*.

Forum Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi

International Non Government Forum On Indonesian Development (INFID) Pada tahun 2019, INFID melaksanakan 4 kegiatan utama terkait Program Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Keempat kegiatan tersebut dinilai merupakan tindakan besar dan strategis. Pada akhir Februari 2019, INFID telah menyelenggarakan Forum Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Jakarta. Penyelenggaraan bersama dengan *Indonesia Global Compact Network* (IGCN), Oxfam GB di Indonesia, Kementerian sosial, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan dihadiri oleh lebih 100 peserta yang mewakili masyarakat sipil, untuk meninjau penerapan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis PBB tantangan dan peluang untuk maju.

Penguatan Pembelajaran Dan Kerjasama Antar-Organisasi

Pada tahun 2019, INFID bekerja sama dengan Pengurus Wilayah Fatayat NU Jawa Barat telah menyelenggarakan

SDO yang melibatkan 32 peserta (17 perempuan dan 15 laki-laki) dari tujuh (7) kabupaten/kota di Jawa Barat. Kepesertaan SDO ini terdiri dari unsur pemerintah kabupaten/kota (kesbangpol kota/kabupaten, bappeda, dan biro hukum) sebanyak 18 orang, kelompok minoritas (Sunda Wiwitan) sebanyak empat orang, organisasi masyarakat sipil (OMS) sebanyak tiga orang, dan organisasi keagamaan tujuh orang¹⁷.

Membangun narasi toleran dan damai bagian dari upaya penguatan peran para aktor selain melakukan pelatihan. Kelompok Islam ultra-konservatif terus menyebarkan pesan intoleransi dan ekstremisme di dunia maya. Salah satu kelompok yang rentan atas penyebaran pesan ini adalah anggota masyarakat yang mengalami proses kelahiran kembali dalam kehidupan beragama. INFID bekerja sama dengan empat mitra media, yaitu NU Online, IBTimes, Arrahim, dan Islami.co melakukan perlawanan sekaligus menawarkan narasi Islam damai di ruang maya.

SIMPULAN

Organisasi Internasional adalah suatu entitas yang dibentuk oleh negara-negara secara sukarela atau berdasarkan kesepakatan bersama. Tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk mencapai tujuan bersama dalam skala internasional, seperti menjaga perdamaian dunia. Kehadiran *International Non-Government Forum On Indonesia* (INFID) yang Berdiri sejak tahun 1985 dengan perjuangan untuk pembangunan Indonesia menjadi tujuan utama organisasi masyarakat sipil. Memiliki 3 fokus program utama yaitu, Penurunan Ketimpangan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Program HAM dan Demokrasi.

Dalam dengan upaya mencegah kekerasan radikalisme dan ekstrimisme, INFID memandang

¹⁶ ibid.

¹⁷ ibid.

ekstrimisme-kekerasan (berbasis agama) sebagai persoalan yang sangat serius. Hal yang menjadi argumentasi adalah hal ini menyangkut penghargaan terhadap keragaman yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Keragaman sudah dilukai, memberikan dampak pada kesatuan tujuan bernegara yang akan pudar serta berdampak bagi eksistensi bangsa dan negara.

International Non-Government Forum on Indonesia Development atau INFID telah menjalankan program *Preventing Violent-Extremism* (PVE) sejak tahun 2016 untuk berkontribusi dalam pengembangan program dan mengadvokasi pencegahan ekstremisme di Indonesia. Program ini dibuat sebagai salah satu upaya INFID untuk mengkonsentrasikan narasi toleransi dan keberagaman diruang publik untuk pemenuhan hak asasi manusia dan pembangunan demokrasi yang berkualitas melalui penelitian, advokasi, dan kampanye publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asasi, Hak, and Manusia Ham, 'Manusia (HAM)', 2005 (2005)
- Asripa, Asripa, Devy Habibi Muhammad, and Ari Susandi, 'Pluralisme Dalam Perspektif Pemikiran Gus Dur Dan Nurcholish Majid', *FALASIFA : Jurnal Studi Keislaman*, 12.02 (2021), 75–90
<<https://doi.org/10.36835/falasifa.v12i02.555>>
- Cardona, M, *Buku Studi Indikator Kota HAM, Solid State Communications*, 1998, CVII
- Clooney, George, 'Hak Azasi Manusia (HAM)', 2019
<<https://doi.org/10.31227/osf.io/9trnz>>
- Fathun, Laode Muh., 'Resensi Human Rights in International Relations', *MANDALA Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 1.1 (2017), 166–73
- GTI, 'Quantifying Peace and Its Benefits Global Terrorism Index 2023', *Institute for Economics and Peace*, 2023, 1–95
<<http://visionofhumanity.org/resources>>
- infid, 'Profil INFID', *Infid.Org*, 2023
- Kasih, Ekawahyu, 'Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia', *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 34.4 (2018), 1–87
<[http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal Edisi 34 Juni 2018.pdf](http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal%20Edisi%2034%20Juni%202018.pdf)>
- Negara, Audit, 'Laporan 2019', *Laporan Ketua Audit Negara 2019*, 2019, 155
<https://drive.google.com/file/d/1w62u9wC2j_pxsTWaE7AO1AUKLjh6-M4D/view>
- Panjaitan, Alfrida Heanity, Neneng Sri Rahayu, and Hamka, 'Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme', *Journal Publicuho*, 6.4 (2023), 1521–36
<<https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.297>>
- Söderbaum, Peter, *Non-Governmental Organisations and Development, International Journal of Water Resources Development*, 2010, xxvi
<<https://doi.org/10.1080/07900627.2010.519527>>
- Takwin, Bagus, Amin Mudzakir, Hairus Salim, Mohamad I. Ahnaf, and Ahmad Z. Hamdi, 'Studi Tentang Toleransi Dan Radikalisme Di Indonesia', 2016, 1–260
<<https://www.infid.org/storage/app/uploads/public/5eb87094f5eb87094f3b0c084987496.pdf>>
- UNDP, 'Background of the SDGS', *UNDP.Org*, 2020